LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI

TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

JAKARTA

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhoNya, penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Kedeputian nidang Informasi Pemasyarakatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kewajiban menyusun LAKIP didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Pusat ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Substansi LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dalam Tahun 2016, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi. Dengan diterbitkannya LAKIP Tahun 2016 ini, diharapkan Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan

Jakarta, Februari 2017
Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan
Pemsyarakatan Standardisasi

Nur Hidayati

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	**i**
DAFTAR ISI	**ii**
RINGKASAN EKSEKUTIF	**iii**
DAFTAR TABEL	**iv**
DAFTAR GAMBAR	**v**
BAB I PENDAHULUAN	**1**
A. Tugas Pokok, Fungsi	1
B. Struktur Organisasi PUSDIKMAS	2
C. Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan Personel Kedeputian IPS	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	**4**
A. Rencana Strategis 2011 - 2015	5
B. Penetapan Kinerja PUSDIKMAS	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	**9**
A. Pencapaian Kinerja	9
B. Akuntabilitas Keuangan	27
BAB IV PENUTUP	**28**
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan aktivitas analisis, penilaian yang sistemik, serta evaluasi pencapaian kinerja untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. LAKIP Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (IPS) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2016 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja PUSDIKMAS, Kedeputian IPS – BSN selama Tahun Anggaran 2016. Capaian kinerja tersebut adalah capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun Anggaran 2015-2019.

Penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi (PUSDIKMAS) BSN Tahun Anggaran 2016 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016. PUSDIKMAS telah menetapkan 5 (lima) indikator kinerja yaitu

1). Persentase peningkatan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 2). Prosentase peningkatan jumlah materi pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan 3). Indeks Kepuasan Pelanggan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4). Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, 5). Prosentase peningkatan jumlah materi promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan. Indikator kinerja ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pemasyarakatan Standandirasi, dengan sub kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi, Pemasyarakatan Standardisasi, Peningkatan Partisipasi masyakarat terhadap standardisasi dan Layanan Pelatihan Pelatihan Standardisasi.

Capaian kinerja PUSDIKMAS pada tahun 2016 : 1). Persentase peningkatan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebesar 11.751 dari target 5082 2). Prosentase peningkatan jumlah materi pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan naik sebesar 4. dari 4 yang ditargetkan 3). Indeks Kepuasan Pelanggan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tercapai 86,32 dari 82 yang ditargetkan 4). Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian naik sebesar 25% 5). Prosentase peningkatan jumlah materi promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan naik sebesar 10%.

Penyerapan anggaran tahun 2016 adalah Rp. 5.612.845.109,- (99,67%) dari pagu Rp. 5.631.252.000,-. Adapun penerimaan PNBP untuk layanan jasa diklat standardisasi sebesar Rp. 1.183.400.000,- (101,23%) dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 1.169.000.000,-.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan .....
Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Pencapaian PUSDIKMAS Tahun 2015 – 2019 .....
Tabel 3. Penetapan target kinerja PUSDIKMAS tahun 2016.....
Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2016 .....
Tabel 5. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM di Layanan Jasa Diklat .....
Tabel 6. Rekapitulasi Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Diklat Standardisasi .....
Tabel 7 . Capaian dan Target Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Diklat Tahun 2016 .....
Tabel 8. Jenis Pelatihan Standardisasi Periode 2015 – 2016 .....
Tabel 9. Klasifikasi Peserta Pelatihan Standardisasi Periode 2011 – 2015 .....
Tabel 10. Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2016 .....
Tabel 11. Daftar UMKM yang sudah mendapatkan Sertifikat SNI dan dalam proses sertifikasi .....
Tabel 12. Perbandingan Kinerja anggaran PUSDIKMAS Tahun 2015 dan 2016 .....
Tabel 13. Perbandingan Kinerja anggaran PUSDIKMAS Tahun 2015 dan 2016 per Output Kegiatan .....

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi PUSDIKMAS .....
Gambar 2. Grafik Peserta Diklat Standardisasi .....
Gambar 3. Grafik Peningkatan Nilai IKM Pelatihan Selama Dua Tahun Terakhir .....
Gambar 4. Trend Frekuensi Penyelenggaraan Pelatihan 2014 – 2015 .....
Gambar 5. Trend Jumlah Peserta Pelatihan Standardisasi periode 2011 – 2015 .....
Gambar 6. Grafik peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi/bergabung di Media Sosial BSN (Facebook) .....
Gambar 7. Grafik peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi/bergabung di Media Sosial BSN (Twitter) .....
Gambar 8. Grafik masyarakat yang berkunjung di blog belanjacerdas.id .....
Gambar 9. Kegiatan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan SPK .....
Gambar 10. Kegiatan Pembinaan Penerapan SNI pada UMKM .....
Gambar 11. Materi promosi SPK .....
Gambar 12. Grafik jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam perumusan SNI tahun 2016 .....
Gambar 13. Grafik Penyebaran lokasi UMKM yang dibina dalam penerapan SNI tahun 2016 .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum Organisasi

1.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional Pasal 130, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunya tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu

1.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 113, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, serta pemasyarakatan standardisasi dan jaminan mutu
b. Penyusunan rencana dan program, pembinaan dan koordinasi di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu
c. Pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu
d. Pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu
e. Pelaksanaan pemasyarakatan standardisasi dan jaminan mutu
f. Pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu
g. Pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu

1.1.3. Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada tahun 2016 Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi memiliki personil sebanyak 38 orang, terdiri dari 1 orang Eselon II, 2 orang Eselon III, 6 Orang Eselon IV dan 27 orang Staf dengan rincian sesuai Struktur Organisasi berikut:

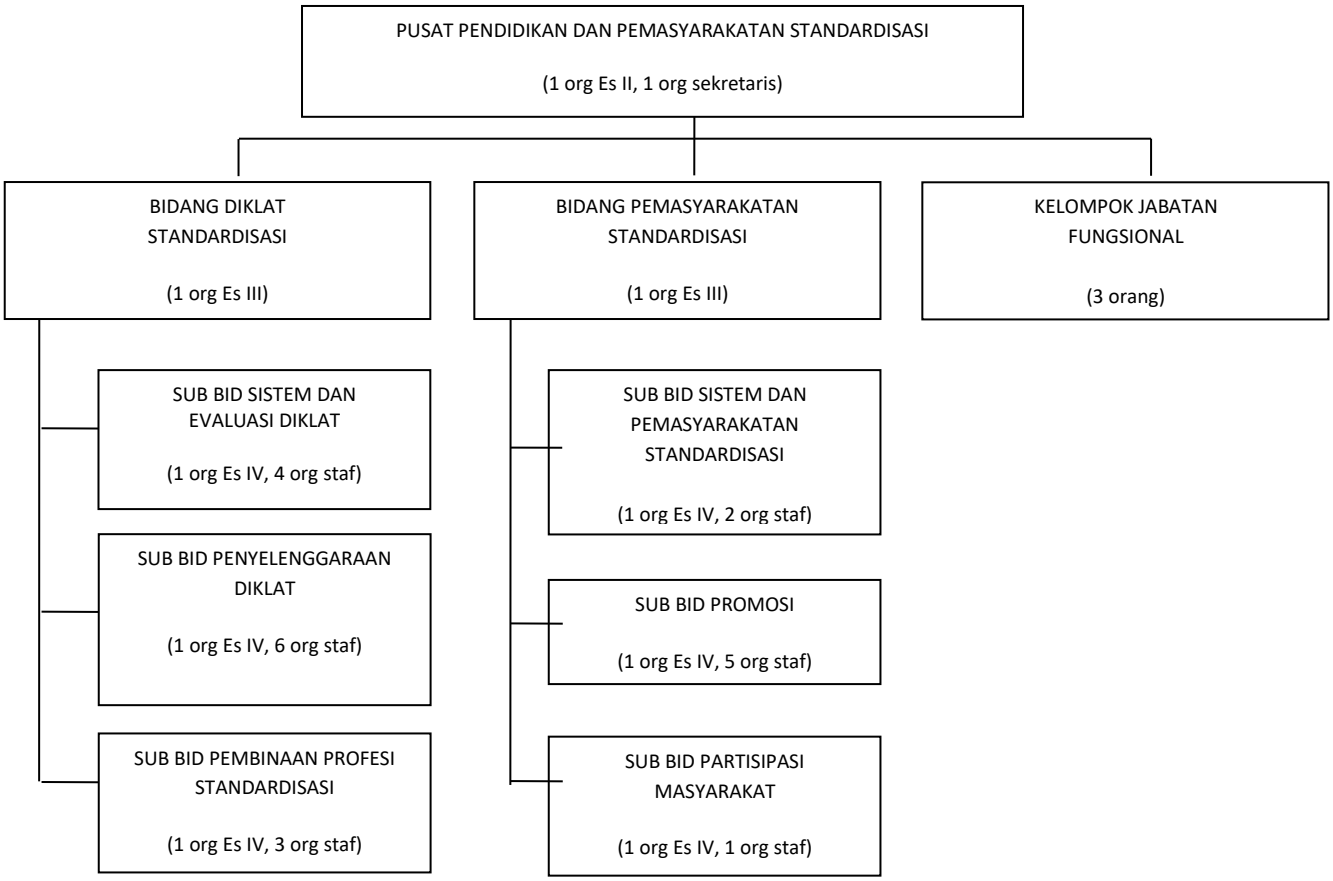

Gambar 1. Struktur Organisasi PUSDIKMAS

1.1.4 Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan Personel PUSDIKMAS

Pada tahun 2016, jumlah personel Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardardisasi tidak mengalami penambahan dikarenakan adanya moratorium terhadap penerimaan pegawai baru di lingkungan PNS. Terdapat 1 (satu) orang staf bidang diklat yang menjalankan tugas belajar. Komposisi dan kualifikasi pendidikan personel Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan

No.	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN					∑ Total
		S3	S2	S1	S0	SMA	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-
2.	Eselon III	-	1	1	-	-	2
3.	Eselon IV		2	3	-	1	6
4.	Fungsional Widyaiswara	-	1	2	-	-	3
5.	Staf	-	1	25	-	1	27
	∑ Total		**5**	**31**	**-**	**2**	**38**

1.2 SISTEMATIKA DAN RUANG LINGKUP LAPORAN

Sistematika laporan akuntabilitas Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi terdiri dari:

1.2.1. Kata Pengantar, memuat dasar hukum kewajiban pembuatan laporan kinerja, menguraikan tentang apa yang sedang dikerjakan organisasi, dan pengantar terhadap keseluruhan isi laporan

1.2.2. Ringkasan Eksekutif, secara integratif memberikan gambaran singkat tentang seluruh isi laporan;

1.2.3. Daftar Isi

1.2.4. Daftar Gambar

1.2.5. Daftar Tabel

1.2.6. Bab I- Pendahuluan, menyajikan tentang penjelasan umum organisasi, meliputi tugas pokok dan fungsi, kewenangan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi (PUSDIKMAS), serta permasalahan utama yang dihadapi dalam menjalankan organisasi.

1.2.7. Bab II- Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja PUSDIKMAS Tahun 2016

1.2.8. Bab III- Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan secara menyeluruh pencapaian kinerja tahun 2016 beserta analisisnya dibandingkan dengan capaian satu tahun sebelumnya, serta menjelaskan tentang evaluasi pencapaian rencana sasaran strategis tahun 2015-2019. Selain itu menjelaskan analisis realisasi anggaran.

1.2.9. Bab IV- Penutup, menguraikan simpulan umum atas laporan kinerja tahun 2016 dan rekomendasi bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Visi Kedeputian IPS 2015-2019

Visi Kedeputian IPS adalah “Meningkatkan budaya standar di Masyarakat”

Misi

Mengembangkan budaya standar, kompetensi dan sistem informasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

Untuk mendukung Visi tersebut, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai :

Tujuan

1. Meningkatkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya kompetensi SDM di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penialain kesesuaian

Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi adalah :

1. Meningkatkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penialain kesesuaian
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK
3. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang SPK

Kegiatan

Untuk mendukung kegiatan di Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Kegiatan Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi terdiri dari:

1. Jejaring Pendidikan Standardisasi
2. Pemasyarakatan Standardisasi
3. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan standardisasi
4. Layanan Pelatihan Standardisasi

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BSN, maka PUSDIKMAS sebagai salah satu Unit Kerja di BSN, berperan dalam mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian." Target pencapaian sasaran strategis PUSDIKMAS, dengan indikator kinerja, dan target sampai tahun 2019 dapat dilihat di tabel 2.

Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Pencapaian PUSDIKMAS Tahun 2015 – 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.	Persentase peningkatan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	10%	10%	10%	10%	10%
	Prosentase peningkatan jumlah materi pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan	10%	10%	10%	10%	10%
	Indeks Kepuasan Pelanggan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	80	82	83	84	85
	Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	10%	10%	10%	10%	10%
	Prosentase peningkatan jumlah materi promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan	10%	10%	10%	10%	10%

B. Penetapan Kinerja PUSDIKMAS

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan padaa akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Adapun tujuan penetapan kinerja adalah

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas kemajuan kinerja;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sesuai dengan penetapan target kinerja 2016 yang tertuang dalam kontrak kerja yang telah ditandatangani, indikator kinerja Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi tertuang dalam tabel 3.

Tabel 3. Penetapan target kinerja PUSDIKMAS tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase peningkatan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	5082
2	Prosentase peningkatan jumlah materi pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan	4
3	Indeks Kepuasan Pelanggan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	82
4	Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	10%
5	Prosentase peningkatan jumlah materi promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan	10%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertenggungjawaban secara periodik. Pencapaian Indikator Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi didasarkan pada kontrak penetapan kinerja tahun 2016 seperti dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2016

No.	Unsur Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian terhadap target
1.	Persentase peningkatan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	5082 (20% dari baseline 2014)	11751	228%
2.	Prosentase peningkatan jumlah materi pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan	4	4	100%
3.	Indeks Kepuasan Pelanggan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	82	86,32	105,27%
4.	Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	10%	25%	250%
5.	Prosentase peningkatan jumlah materi promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan	10%	10%	100%

Indikator 1	Persentase peningkatan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian salah satu kegiatan untuk tercapainya sasaran PUSDIKMAS meningkatnya kompetensi SDM di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dengan semakin banyaknya peserta pendidikan dan pelatihan di bidang SPK, diharapkan akan terwujudnya SDM yang unggul di bidang SPK. Hal ini tentu akan mendorong terwujudnya misi budaya standar di kalangan masyarakat.

Pada tahun 2016 ini, presentase peningkatan jumlah peserta diklat di bidang SPK mengalami penurunan terhadap jumlah peserta diklat standardisasi tahun 2015. Dimana capaian jumlah peserta diklat tahun 2015 sebesar 17087, sedangkan tahun 2016 sebesar 11751 atau mengalami penurunan sebanyak 31%. Hal ini disebabkan karena adanya pemotongan anggaran yang menyebabkan batalnya kegiatan pendidikan standardisasi di beberapa universitas.

Gambar 2. Grafik Peserta Diklat Standardisasi

Indikator 2	Prosentase peningkatan jumlah materi pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan

Capaian kinerja untuk peningkatan jumlah materi pendidikan dan pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang disebarluaskan tercapai 4 dari 4 materi diklat yang ditargetkan. Materi Diklat tersebut adalah Buku Manfaat Ekonomi Standardisasi dalam bentuk e-learning, Materi Pelatihan Pemahaman SNI ISO 9001:2015, Audit Internal SNI ISO 9001:2015, dan Pemahaman SNI ISO/IEC 17021-1:2015.

Buku Manfaat Ekonomi Standar disusun untuk memperkaya konten e-learning BSN. Buku ini kemudian dibuat beberapa versi yaitu flipbook, presentasi, video presentasi dan juga dilengkapi dengan soal-soal test. Melalui e-learning ini juga BSN membekali para mahasiswa dan juga lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Selain materi pendidikan, BSN telah berhasil menyusun 3 (tiga) materi pelatihan yang telah digunakan dalam pelaksanaan pelatihan. Materi pelatihan tersbut adalah Pemahaman SNI ISO 9001:2015, Audit Internal SNI ISO 9001:2015, dan Pemahaman SNI ISO/IEC 17021-1:2015. Dasar penyusunan materi tersebut berdasarkan permintaan stakeholder, masukan dan evaluasi pelatihan dan perkembangan standar yang ada.

Indikator 3	Indeks Kepuasan Pelanggan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan diklat standardisasi dilakukan melalui survei kepada pelanggan, yaitu peserta pendidikan dan pelatihan standardisasi. Adapun mekanisme survei yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM di Layanan Jasa Diklat

Item Survei	Layanan Jasa Diklat
Metode	*Total Sampling***
Jumlah responden	1224 orang
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Tempat Pelaksanaan	Lokasi Pelatihan

*) Kuesioner dibagikan kepada pengunjung perpustakaan yang datang berkunjung

**) Kuesioner dibagikan kepada seluruh peserta dan *personal in charge* pelatihan

Pengolahan data dilakukan per unsur layanan yang mengacu pada 14 unsur yang ditetapkan dalam Kepmen PAN dan RB diatas ditambah dengan unsur pengembangan sesuai dengan dimensi atau unsur pengaruh kualitas pelatihan, yaitu instruktur pelatihan, materi pelatihan dan asisten instruktur pelatihan. Adapun hasil pengolahan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Rekapitulasi Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Diklat Standardisasi

No.	Elemen Pertanyaan	Nilai IKP
1.	Kemudahan Prosedur Pelayanan Pelatihan	84,71
2.	Kejelasan Informasi Persyaratan Pelayanan Pelatihan	84,99
3.	Kejelasan Petugas/Sekretariat Pelayanan pelatihan	83,44
4.	Kedisiplinan Petugas/Sekretariat Pelayanan Pelatihan	86,39
5.	Tanggung Jawab Petugas/Sekretariat Pelayanan Pelatihan	86,74
6.	Kemampuan Petugas/Sekretariat Pelayanan Pelatihan	83,38
7.	Kecepatan Pelayanan Pelatihan	83,61
8.	Keadilan mendapatkan pelayanan pelatihan (tidak diskriminatif)	87,26
9.	Kesopanan dan Keramahan Petugas/Sekretariat Pelayanan Pelatihan	89,48
10.	Kewajaran biaya pelayanan pelatihan	82,81
11.	Kepastian biaya pelayanan pelatihan	85,36
12.	Kepastian jadwal pelayanan pelatihan	84,05
13.	Kenyamanan tempat pelayanan pelatihan	87,75
14.	Keamanan tempat pelayanan pelatihan	88,33
15.	Instruktur menguasai materi pelatihan	91,77
16.	Instruktur mampu menyampaikan materi secara jelas	89,78
17.	Instruktur mampu memberikan motivasi kepada peserta	86,07
18.	Instruktur mampu menjawab pertanyaan peserta dengan jelas dan tuntas	88,56
19.	Instruktur mampu mengelola waktu pelatihan dengan baik	84,54
20.	Materi pelatihan sesuai dengan sasaran pelatihan	88,73
21.	Sistematika materi pelatihan mudan dipahami	83,33
22.	Materi pelatihan sesuai dengan perkembangan terkini (mutakhir)	85,82
23.	Asisten instruktur mampu membantu kelancaran proses pelatihan	84,41
24.	Asisten instruktur mampu berkomunikasi secara efektif dengan peserta	85,35
25.	Asisten instruktur mampu berperilaku baik (sopan)	89,22
	Rata-rata	**86,32**

Dari hasil pengolahan IKP tersebut di atas, diketahui bahwa Kepuasan pelanggan jasa informasi melalui Perpustakaan BSN dan Kepuasan pelanggan layanan jasa diklat standardisasi berada pada kategori "SANGAT BAIK". Secara keseluruhan pencapaian target Indeks Kepuasan pelanggan layanan jasa Diklat tertuang dalam tabel 7.

Tabel 7. Capaian dan Target Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Diklat Tahun 2016

Indeks Kepuasan Pelanggan	Target	Capaian
Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Diklat Standardisasi	82	86,32

Gambar 3. Grafik Peningkatan Nilai IKM Pelatihan Selama Dua Tahun Terakhir

Dari tabel dan gambar di atas terlihat bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan layanan jasa Diklat sebesar 86,32. Nilai ini masuk ke dalam kategori SANGAT BAIK sesuai dengan target yang ditetapkan. Selama dua tahun terakhir, IKM pelatihan BSN mengalami kenaikan sebesar 4,84%.

Kegiatan pelayanan jasa diklat yang dilaksanakan oleh BSN sangat diminati baik dari pihak industri, pemerintah, akademisi dan konsumen. Pelatihan yang diselenggarakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Diklat BSN telah melaksanakan 8 (delapan) kali *public training* dan 51 (empat puluh tiga) kali *in-house training*, sehingga secara keseluruhan Diklat BSN menyelenggarakan 59 pelatihan di tahun 2016.

Perkembangan pelatihan selama tahun 2015 - 2016 berdasarkan jenis pelatihan dan klasifikasi peserta pelatihan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 8. Jenis Pelatihan Standardisasi Periode 2015 - 2016

No	Standar	2015	2016
1	SNI ISO/IEC 17025 *(Persyaratan umum Laboratorium Penguji dan Kalibrasi)*	25	24
2	SNI ISO 9001 *(Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan)*	4	6
3	SNI 19011 *(Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan atau Lingkungan)*	2	3
4	SNI ISO/IEC 17020 *(Persyaratan Umum Pengoperasian berbagai Lembaga Inspeksi)*	4	9
5	SNI ISO/IEC 17065 *(Persyaratan Umum Pengoperasian berbagai Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa)*	2	1
6	ISO/IEC 17021 *(Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen)*	2	2
7	SNI ISO 15189 *(Persyaratan Khusus Kompetensi Laboratorium Medik)*	3	1
8	ISO 22000 *(Sistem Manajemen Keamanan Pangan)*	-	-
9	SNI ISO 27001:2009 *(Sistem Manajemen Keamanan Informasi)*	-	-
10	SNI ISO/IEC 17043:2010 (Penyelenggara Uji Profisiensi)	2	1
11	Pelayanan Prima Laboratorium	-	7
12	SNI ISO/IEC 17024:2012	1	1
13	SNI ISO/IEC 17067:2013	1	-
14	Validasi Metode Pengujian Kimia	1	2
15	Estimasi Ketidakpastian Pengukuran	2	1
16	Sistem Manajemen Sertifikasi Produk	2	2
17	ISO 13528	-	1
	Total	**51**	**59**

* n kali

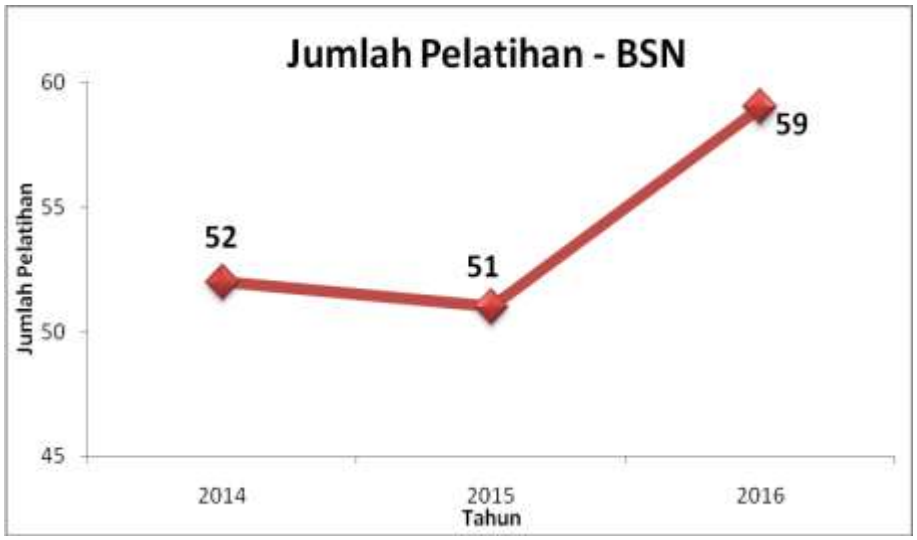

Gambar 4. Trend Frekuensi Penyelenggaraan Pelatihan 2014 – 2015

Meningkatnya jumlah pelatihan dan jumlah peserta pelatihan pada tahun 2016 karena bertambahnya materi pelatihan baik pelatihan baru maupun materi pelatihan hasil revisi, yang disesuaikan dengan perkembangan standar terbaru. Di samping itu, mulai terlihat kesadaran pihak terkait dalam rangka meningkatkan kompetensi personil dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 9, yang menggambarkan jumlah peningkat peserta pelatihan dari tahun 2015-2016.

Selanjutnya menurut data Tabel 9, dapat dilihat bahwa jumlah peserta dari lembaga pemerintah dan perguruan tinggi mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberterimaan BSN di mata perguruan tinggi cukup baik. Data ini juga merupakan perkembangan yang baik dalam kaitannya dengan MoU BSN dengan Perguruan Tinggi dalam pendidikan standardisasi, karena setelah berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut MoU tersebut, kini *awareness* akademisi akan pentingnya penerapan standar sudah semakin tinggi.

Tabel 9. Klasifikasi Peserta Pelatihan Standardisasi Periode 2011 – 2015

No.	Klasifikasi	2015	2016
1	Lembaga Pemerintah	668	750
2	Industri	398	310
3	Perguruan Tinggi	89	206
4	Masyarakat umum	23	0
	Total	1178	1266

* dalam orang

Gambar 5. Trend Jumlah Peserta Pelatihan Standardisasi periode 2011 – 2015

Indikator 4	Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian,

Pada tahun 2016, capaian indikator kinerja untuk prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) mengalami perubahan dengan ditambahkannya masyarakat yang mendapat edukasi SPK. Masyarakat yang mendapat edukasi SPK dihitung dari masyarakat yang mendapat edukasi dan terpapar kegiatan promosi dari media massa, baik radio, TV, media online, media cetak, dari pertemuan/kampanye massal. Pada era keterbukaan dengan canggihnya perkembangan teknologi informasi, strategi promosi suatu lembaga/organisasi cenderung beralih dari media konvensional ke media nonkonvensional seperti media online/media digital dan pemanfaatan media sosial. Pada tahun 2016 edukasi publik banyak dilakukan melalui media digital, sedangkan promosi melalui media konvensional tetap dilakukan seperti di radio dan televisi dengan melalui sistem partnership, mengingat dana yang terbatas. Sedangkan kegiatan Sosialisasi substansi SNI kepada pelaku usaha dan LPK tetap dilakukan melalui forum workshop/FGD/Pertemuan.

Melalui kegiatan tersebut capaian jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan SPK mencapai 2.072.092 dari target 1.800.000 orang (sebagai baseline). Prosentase peningkatan jumlah masyarakat mencapai 25% dari target 10% yang ditetapkan di tahun 2016 ini. Pencapaian yang melebihi target ini bersumber dari edukasi SNI melalui digital yang bisa menjangkau ratusan ribu orang. Kecenderungan masyarakat saat ini yang lebih suka membaca artikel dari media online, menjadi alternatif bagi strategi promosi ke depannya. Namun begitu untuk menarik minat masyarakat dalam membaca artikel tentang SNI, diperlukan pengemasan artikel

dan judul yang menarik sehingga masyarakat ada ketertarikan untuk membaca. Data pencapaian ini masih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia di mana Tahun 2016, usia produktif Indonesia mencapai 178 juta, dengan demikian capaian edukasi SNI baru menyasar 11 persennya. Hal in berarti masih perlu usaha yang keras dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi SPK kepada masyarakat Indonesia.

Gambar 6. Grafik peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi/bergabung di Media Sosial BSN (Facebook)

Berdasarkan gambar 6, pada tahun 2016, jumlah orang yang yang meng-klik "suka" atau "*like*" pada akun *Facebook* Badan Standardisasi Nasional mengalami peningkatan sebanyak 1696 orang atau sebesar 46,94%. Pada tanggal 1 Januari 2016 akun *Facebook* BSN mendapatkan 3613 *likes* dan di tanggal 31 Desember 2016 bertambah menjadi 5309 *likes*.

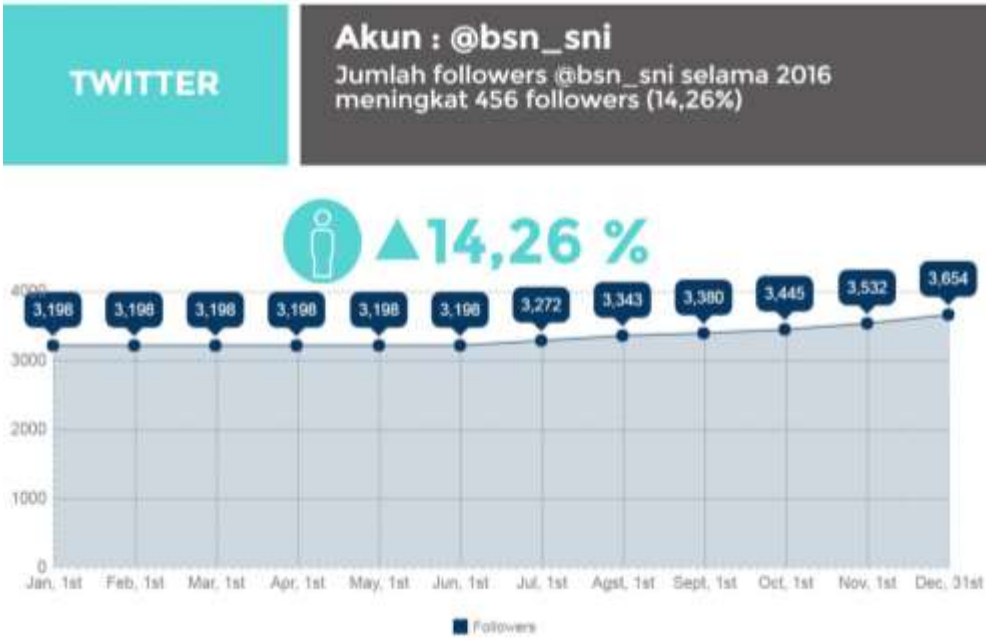

Gambar 7. Grafik peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi/bergabung di Media Sosial BSN (Twitter)

Akan tetapi, akun media sosial *Twitter* @bsn_sni tidak mengalami kenaikan sebesar yang diperoleh akun *Facebook* Badan Standardisasi Nasional. Sepanjang tahun 2016, akun @bsn_sni hanya mendapatkan penambahan *followers* sebanyak 465 atau sebesar 14,26%. Bahkan di semester pertama 2016, jumlah *followers* sama sekali tidak bertambah atau stagnan (Gambar 7).

Gambar 8. Grafik masyarakat yang berkunjung di blog belanjacerdas.id

Untuk meningkatkan publikasi mengenai SNI di media online dan memberikan edukasi kepada konsumen akan pentingnya produk ber SNI, BSN membuat blog tentang bagaimana belanja cerdas. Blog ini baru diluncurkan pada bulan Mei 2016 dan masih dalam taraf pengembangan. Sepanjang tahun 2016 pula, blog belanjacerdas.id yang dikelola oleh BSN un telah dilihat oleh 512 pengunjung (*session*). Dari angka tersebut, 67,6% merupakan pengunjung baru sedangkan 32,4% merupakan "*returning visitors*" atau pengunjung yang pernah melihat blog belanjacerdas.id dan kembali mengaksesnya. Rata-rata pengunjung melihat 1,99 halaman belanjacerdas.id setiap kali mengakses blog tersebut, dengan durasi kunjungan rata-rata selama 1,59 menit (Gambar 8).

Berdasarkan data tersebut, Bidang Pemasyarakatan Standardisasi masih perlu meningkatkan partisipasi masyarakat mengakses blog ini. Namun infrastruktur blog yang masih dalam pengembangan, maka membuat akses terhadap blog masih kurang maksimal. Tahun 2017, akan direncanakan peningkatan *trafic* blog melalui *upgrade hosting*,meningkatkan *backlink* dan *Search Engine Optimizer (SEO)* serta promosi kepada publik blog belanja cerdas ini melalui media sosial. Partisipasi masyarakat

dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian juga dihasilkan melalui kegiatan workshop/sosialisasi/talkshow kepada pelaku usaha dengan bekerjasama dengan KKP, BPOM, komunitas (Gambar 9).

Sosialisasi substansi SNI di Bidang Mikrobiologi

Gathering SNI Award

Edukasi SNI kepada Publik dalam Hakteknas

Talkshow Role Model Penerap SNI

Talkshow UKM Pangan

Pertemuan Sinergi dalam pembinaan UMKM dengan KKP dan BPOM

Gambar 9. Kegiatan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan SPK

Partisipasi pelaku usaha dalam penerapan SNI didorong khususnya kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk UMKM ditingkat nasional (Gambar 10).

Pembinaan UKM Poklasar Taman Grya

Pembinaan UKM Cindy Group

Pembinaan UKM Mina Food

Pembinaan UKM Bintan Snack Millenium

Gambar 10. Kegiatan Pembinaan Penerapan SNI pada UMKM

Indikator 5	Prosentase peningkatan jumlah materi promosi yang disebarluaskan kepada publik

Capaian indikator kinerja prosentase peningkatan jumlah materi promosi yang disebarluaskan pada tahun 2016 tercapai 10 % dari 10 % yang ditargetkan atau tercapai 24 materi promosi sesuai yang ditargetkan. Pada tahun ini, BSN tidak banyak menghasilkan materi promosi dalam bentuk audio visual dikarenakan pemotongan anggaran. Materi promosi lebih diperbanyak dalam bentuk visual infografis untuk disebarluaskan di media sosial (seperti dalam Gambar 10).

Majalah SNI Valuasi

Video Si Rino

Video Role Model Penerap SNI

Video Mengenai SNI Award

Infografis

e-poster

Gambar 11. Materi promosi SPK

Indikator Pendukung	Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-SNI

Untuk mendukung indikator kinerja utama Deputi bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, bidang Pemasyarakatan Standardisasi menyelenggarakan survei Tingkat Persepsi Masyarakat terhadap daya saing produk ber SNI. Ketika masyarakat mempunyai persepsi yang positif terhadap daya saing produk berSNI, artinya masyarakat menilai bahwa produk berSNI mempunyai daya saing yang tinggi dan asumsi, masayrakat percaya produk berSNI mempunyai keuanggulan lebih dibanding produk yang tidak memenuhi SNI. Seharusnya produk yang berSNI dapat lebih berdaya saing di pasar baik di pasar lokal, nasional maupun global.

Untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk berSNI, BSN melakukan survei dengan 4000 responden yang dilakukan di 10 kota besar, yaitu Medan, Riau, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, Makassar, Manado dan Bali. Survei disebarkan kepada stakeholder yang terdiri dari unsur akademisi, pelaku usaha, konsumen dan pemerintah. Berdasarkan hasil survei, persepsi masyarakat terhadap daya saing produk berSNI cukup tinggi yaitu dengan skor 4,05 (skala likert, kategori baik). Nilai ini melebih target yang diharapkan yaitu sebesar 3,2, tercapai (125%). Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai persepsi yang positif bahwa produk berSNI mempunyai daya saing yang cukup baik dan masayarakat juga mempunyai persepsi yang posiif bahwa produk berSNI mempunyai value yang lebih dibanding produk yang tidak ber SNI.

Untuk mendukung indikator kinerja utama Tingkat persepsi masyarakat terhadap SPK, Bidang Pemasayarakatan Standardisasi juga melakukan survei tingkat persepsi masyarakat terhadap SPK. Kegiatan ini juga dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja utama deputi bidang informasi dan pemasyarakatan standardisasi. Kegiatan penyebarluasan informasi, pendidikan, pemasyarakatan standardisasi yang dilakukan BSN diharapkan meningkatkan penerapan SNI di kalangan pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk bertanda SNI sehingga masyarakat berorientasi pada produk berSNI. Keberhasilan kegiatan pendidikan, pemasyarakatan standardisasi dan penyebarluasan informasi serta pembinaan penerapan SNI diharapkan akan menghasilkan persepsi masyarakat terhadap SPK semakin baik.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN melakukan survei yang diselenggarakan secara bersamaan dengan survei persepsi masyarakat terhadap daya saing produk berSNI. Survei dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 4000 responden.

Tabel 10. Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2016

Pernyataan	Nilai Indeks	Prosentase	Indeks Total	Indeks Total dalam skala 5
Pengetahuan Tentang BSN	19,13 (dari 25)	**76,52**	**75,02**	**3,75**
Pengenalan Tentang SNI	21,69 (dari 25)	86,76		

Penerapan SNI	19,51 (dari 25)	78,04		
Sertifikasi SNI	14,69 (dari 25)	58,76		

Berdasarkan tabel tersebut, secara keseluruhan persepsi masyarakat terhadap SPK sudah baik. Masyarakat sudah mengetahui institusi BSN yang menetapkan SNI (76,52 %) dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 49,2%. Namun sebagian juga ada yang masih memahami bahwa sertifikasi SNI itu dilakukan oleh BSN. Secara umum, masyarakat sudah tahu SNI, apa itu SNI, dan tanda SNI pada produk (86,76%). Masyarakat mempunyai persepsi yang positif terhadap penerapan SNI untuk meningkatkan daya saing produk dan untuk perlindungan masyarakat (78,04%). Namun terkait dengan sertifikasi SNI, persepsi masyarakat masih rendah (58,76 %). Masyarakat masih melihat bahwa proses sertifikasi itu tidak mudah dan rumit serta mahal. Disamping itu masyarakat juga belum memahami bahwa sertifikasi SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk. Persepsi ini hampir sama untuk semua unsur stakeholder.

Berdasarkan hasil tersebut, tingkat persepsi masayarakat menghasilkan indeks persepsi sebesar 75,02 (skala 100) atau 3.75 (skala 5). Nilai ini tidak mencapai target yang diharapkan sebesar 3,8, atau hanya tercapai 98,7 %. Hal ini dikarenakan nilai yang terkait dengan persepsi tentang Sertifikasi SNI masih rendah, meskipun sudah naik dari tahun sebelumnya yang hanya 50,4 %. Untuk itu, perlu edukasi kepada pemangku kepentingan khususnya kepada pelaku usaha mengenai mekanisme sertifikasi SNI dan juga BSN kerjsama dengan stakeholder perlu meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur mutu (LPK), sehingga LPK mudah didatangi oleh pelaku usaha di wilayah tersebut yang membuat biaya sertifikasi bisa diminimalisir

Untuk melihat efektifitas pelaksanaan pemasyarakatan standardisasi, dalam survei tersebut, BSN juga menanyakan strategi promosi yang diharapkan oleh masyarakat masih didominasi melalui media mainstream seperti TV, Radio, media cetak dll. Responden yang memilih media online sebagai sumber informasi mengenai SNI hanya 6,3%, cenderung turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 16,6%. Hal ini bisa saja disebabkan karena mayoritas usia responden berada pada rentang 35 – 55 tahun. Pada usia responden ini, lebih menyukai media *mainstream* dan belum banyak yang menyukai media online. Selain itu, masyarakat di daerah masih menyukai informasi yang didapatkan dari media cetak atau televisi. Akademisi (dosen) justru yang lebih banyak memilih media online (sosial media, media berita online) sebagai sumber informasi mengenai SNI.

Secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja Bidang Pemasyarakatan Standardisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Capaian penetapan kinerja tersebut, dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu:

1. **Melakukan Promosi untuk Pelaku Usaha, Regulator dan Lembaga Penilaian Kesesuaian.** Kegiatan ini dilakukan dengan:
   - Mempromosikan SNI baru dan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan LPK terkait substansi SNI.
   - Memberikan awareness kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah akan pentingnya SNI sebagai acuan dalam usaha dengan bekerjasama dengan Dinas terkait, komunitas, dan media partner.
   - Melakukan sinergi dengan kementerian dan lembaga yang bergerak dalam pembinaan kepada UMKM agar memudahkan UMKM dalam memenuhi regulasi dan pemenuhan SNI.
   - Membuat materi promosi dalam bentuk infografis terkait penerapan SNI, sertifikasi SNI dan skema akreditasi yang disebarluaskan kepada stakeholder

2. **Melakukan Promosi untuk Penerap Standar Nasional Indonesia.**

   Kegiatan ini dilakukan bertujuan mengajak perusahaan/organisasi penerap SNI untuk ikut dalam SNI Award, melalui gathering SNI Award dan rekuitasi peserta. Sosialisasi SNI Award dan Rekruitasi peserta kerjasama dengan lembaga sertifikasi. Promosi untuk penerap SNI juga dilakukan dengan mempromosikan UMKM penerap SNI sebagai role model bagi UMKM lainnya untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi UMKM lainnya

3. **Melakukan Promosi untuk Publik**

   Pada tahun 2016, promosi dan edukasi publik lebih banyak dilakukan melalui media digital baik melalui media online dan media sosial. Media sosial menjadi sarana komunikasi kepada publik untuk menyebarluaskan informasi SPK. Kecenderungan masyarakat kota yang beralih ke media online, menjadikan medsos BSN mempunyai pengikut/folower meningkat dari tahun sebelumnya. Promosi SPK kepada publik juga dilakukan melalui radio, televisi dan media online. Dengan promosi yang dilakukan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang “aware” dan paham mengenai SPK.

   Untuk melakukan edukasi kepada konsumen dan memperbanyak artikel tentang manfaat produk ber SNI, BSN membuat blog belanjacerdas. Blog ini dalam pengembangan untuk dijadikan referensi bacaan ringan bagi konsumen dalam

memilih produk berSNI. Untuk publikasi, BSN juga menerbitkan majalah SNI Valuasi yang disebarkan kepada stakeholder. Tahun 2016, SNI Valuasi dikembangkan dalam bentuk e-magazine agar dapat mudah diakses melalui media online.

4. Melakukan Pembinaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Dalam Kegiatan Standardisasi

BSN melakukan fasilitasi pembinaan kepada masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pengembangan SNI melalui penyelenggaraan *Forum Group Discussion (FGD*) untuk membahas topik RSNI3. Untuk mengajak para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam perumusan SNI, BSN juga menyebarluaskan informasi substansi RSNI3 melalui web site dan media sosial BSN setiap minggunya. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam perumusan SNI seperti dalam Gambar 12:

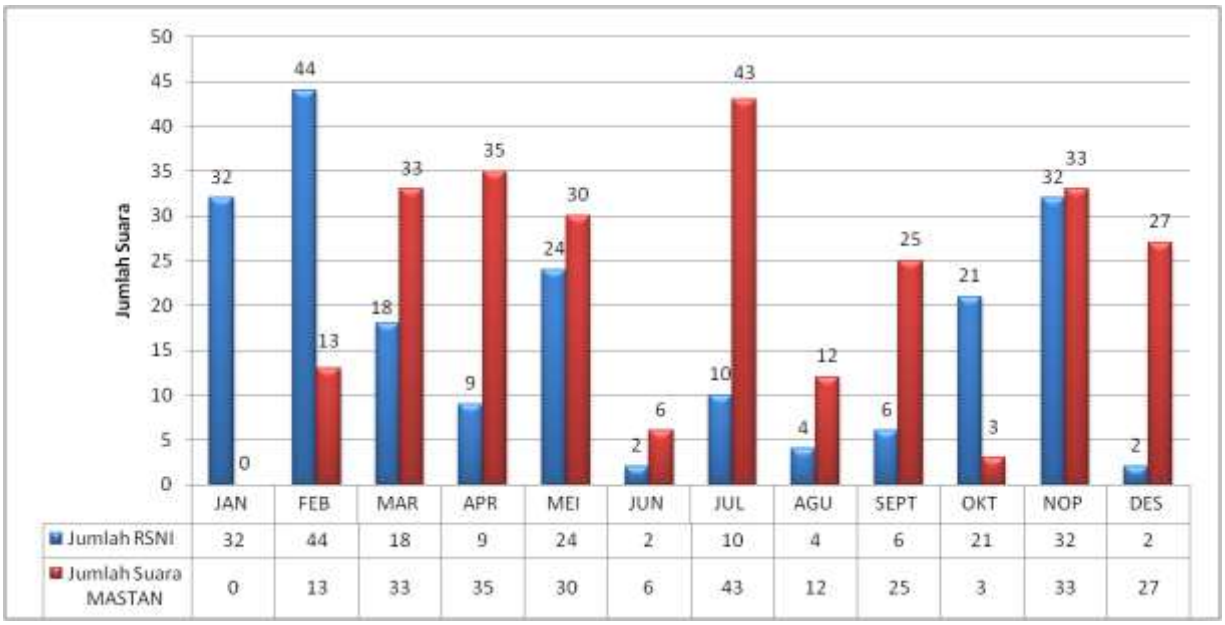

Gambar 12. Grafik jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam perumusan SNI tahun 2016

Berdasarkan grafik tersebut, partisipasi masayrakat dalam perumusan SNI masih sangatkah rendah. Perlua da upaya persuasif untuk meningkatkan masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap rancangan SNI. Tahun 2016 langkah persuasif dilakukan dengan FGD yang mengundang para pemangku kepentingan terkait content RSNI3 tersebut, namun hanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Upaya ini akan berimplikasi kepada anggaran, langkah yang akan ditempuh adalah dengan mengirimkan email (blasting email) kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan

bidang minat stakeholder. Namun data email pelanggan BSN dan para pemangku kepentingan dengan sektor terkait belum ada. Sehingga masih dalam bentuk manual, sehingga kadang informasi yang disebarluasakan belum tepat ke target sasaran.

5. Melakukan Pembinaan UKM Dalam Penerapan Standar Nasional Indonesia

BSN melakukan pembinaan penerapan SNI kepada UMKM bekerjasama dengan KL seperti KKP, BPOM, Pemda dan komunitas pembina UMKM seperti PUPUK, INOTEK, PNM, FLIPMAS. Pada tahun 2016, BSN melakukan pembinaan penerapan SNI kepada 45 UMKM yang terdiri dari 24 pangan dan 21 non pangan. Target pembinaan adalah sertifikasi SNI produk. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pembinaan penerapan SNI produk ini seperti belum tersedianya SNI, belum tersedianya laboratorium yang diakreditasi KAN dengan ruang lingkup dimaksud, dan belum terpenuhinya standar sarana produksi pada UMKM pangan maupun faktor teknis lainnya. Dengan kondisi tersebut, pada tahun 2016 ada 5 UMKM sudah mendapatkan sertifikat SNI dan 11 UMKM dalam proses sertifikasi (seperti pada tabel dibawah ini).

Tabel 11. Daftar UMKM yang sudah mendapatkan Sertifikat SNI dan dalam proses sertifikasi

No	Nama UMKM	Sektor	Produk	Keterangan
1.	PT Hari Mukti Teknik	Non pangan	Mesin Laundry	Sudah mendapatkan sertifikat SMM SNI ISO 9001 dan SNI Produk
2.	UD Batik Satrio	Non pangan	Batik	Sudah mendapatkan sertifikat SNI Produk
3.	UD Batik Laweyan	Non pangan	Batik	Sudah mendapatkan sertifikat SNI Produk
4.	PT. Fajar Cipta Wacana	Non pangan	Konverter kit	Sudah mendapatkan sertifikat SNI Produk
5.	PT. Putra Multi Cipta Teknikindo	Non Pangan	Alat pembatik	Sudah mendapat Sertifikat SMM SNI ISO 9001 dan sertifikat SNI Produk
6.	PT. Trisakti Putra Bakti	Non pangan	Bola Bulu Tangkis	Proses sertifikasi SNI Produk
7.	CV Carita Niaga	Non Pangan		Proses sertifikasi SNI Produk
8.	Taman Grya	Pangan	Keripik belut	Proses sertifikasi SNI Produk
9.	Rumah Cobek	Pangan	Bandeng presto	Proses sertifikasi SNI Produk
10.	Minafood	Pangan	Naget	Proses sertifikasi SNI

				Produk
11.	UMKM BDS Snack	Pangan	Amplang	Proses sertifikasi SNI Produk
12.	UMKM Alang-alang subur	Pangan	Abon Ikan	Proses sertifikasi SNI Produk
13.	UMKM Indomina cipta	Pangan		Proses sertifikasi SNI Produk
14.	Raisa	Pangan	Dodol Pisang	Proses sertifikasi GMP
15.	Millenium	Pangan	Kerupuk ikan	Proses sertifikasi SNI Produk
16.	Mutiara Gading	Pangan	Abon Ikan	Proses sertifikasi SNI Produk

Dari 45 UMKM yang dibina ada 3 UMKM yang tidak dilanjutkan proses pembinaannya untuk tahun 2017 karena karena belum ada pasar untuk produk yang mereka hasilkan dan spesifikasi produk yang masih mengalami perubahan, UMKM tersebut adalah usulan dari Yayasan INOTEK yaitu CV. Arame Indonesia (Arame) dan PT. Atnic Ekotekno Wicaksana (Blumbang Reksa) sedangkan untuk Evindo, pembinaannya akan dilanjutkan oleh Kemenristek.

Sedangkan 26 UMKM lainya masih akan dilanjutkan pembinaannya dengan 5 UMKM pembinaannya akan fokus pada pemenuhan standar sarana produksinya terlebih dahulu yaitu UMKM Pas Mantab, CV. Pradipta Jaya Food, Kelompok Usaha Pelita 15, dan Pempek dengan dibantu oleh KKP dan Dinas setempat dan UD. Dikari (Kerupuk Jawara) kerjasama dengan PNM. Ada 4 industri yang masih dalam tahap pengembangan SNInya yaitu CV. Gede Darma Putra / GDP Filter (IGW Home Ultrafilter), PT. Maxzer Solusi Steril (Sulis), PT. Bumibraja Nusantara (Bumibraja) dan Gesit. Sedangkan 1 (produk bawang goreng) masih dalam tahap usulan penambahan ruang lingkup untuk laboratorium yang diakreditasi KAN.

Berdasarkan Gambar 9, lokasi UMKM yang dibina tahun 2016 masih didominasi di Jawa. Tahun 2017 diharapkan akan tumbuh UMKM di luar Jawa yang sertifikasi SNI.

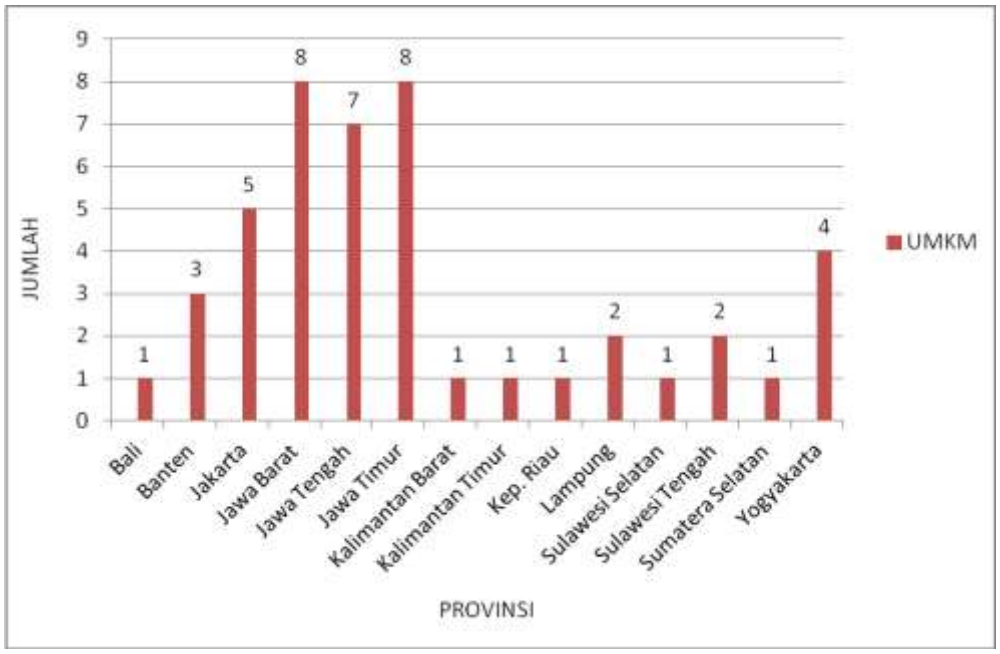

Gambar 13. Grafik Penyebaran lokasi UMKM yang dibina dalam penerapan SNI tahun 2016

6. Melakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Standardisasi di Forum Internasional

Indonesia sejak tahun 2009 telah aktif berpartisipasi sebagai p member ISO COPOLCO, yang merupakan organisasi ISO yang membidangi masalah konsumen. Pada tanggal 13 - 17 Juni 2016 diselenggarakan ISO/COPOLCO Plenary Meeting di Jenewa, Swis. Pertemuan ini Indonesia diwakili oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Hadir pula dalam pertemuan tersebut wakil dari organisasi regional dan internasional yaitu: ANEC, Consumer Internasional (CI), OIML dan ISO Central Sekretariat.

Delegasi Indonesia diketuai oleh Tri Widyani Pangastuti, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota Malan. Salah satu usulan yang disampaikan delegasi Indonesia yaitu bahwa Indonesia bersedia untuk menjadi tuan rumah ISO/COPOLCO Plenary Meeting tahun 2018.

Untuk lebih meningkatkan kontribusi konsumen dalam pengembangan standar Internasional maka BSN membentuk national Mirror Committee (NMC) ISO/COPOLCO yang beranggotakan lembaga konsumen, dan lembaga pemerintah yang membidangi konsumen. Tugasnya antara lain member masukan terhadap draft standar ISO COPOLCO. Draft standar ISO dan dokumen COPOLCO yang telah ditanggapi oleh NMC tersebut, antara lain :

1. N 195 CIB - Survey to investigate service standardization needs from the consumer's point of view.
2. N 196 Consultation on Financial Literacy for Youth.
3. N 197 Proposal for an International Standard on service to vulnerable consumers.
4. SO/IEC CD Guide 14 - Product information for consumers.
5. ISO COPOLCO DIS ISO/IEC DGuide 46 (Ed 2) - Comparative testing of consumer products and related services - General principles

Untuk WG 18 - Consumer issues in services, BSN mengajukan Rifana Erni dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk menjadi expert di WG tersebut. Yang nantinya bertugas untuk memberikan tanggapan terhadap draft dokumen standar WG 18.

B. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi diberikan alokasi pendanaan kegiatan yang berasal dari Rupiah Murni maupun dari Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), adapun jumlah dan kondisi anggaran PUSDIKMAS dalam kurun waktu 2015 s.d 2016, adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel 12 :

Tabel 12. Perbandingan Kinerja anggaran PUSDIKMAS
Tahun 2015 dan 2016

SUMBER ANGGARAN	KOMPONEN	JUMLAH ANGGARAN PUSDIKMAS		KETERANGAN (*)
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	
DIPA	Pagu	Rp. 9.636.552.000,-	Rp. 5.631.252.000,-	Turun 41,56 %
	Penyerapan	Rp. 9.388.226.755,-	Rp. 5.612.845.109,-	
	Persentase Penyerapan	97,76%	99.67%	Naik 1,91 %

(*) *Persentase perbandingan tahun 2015 terhadap tahun 2016*

Tabel 13. Perbandingan Kinerja anggaran PUSDIKMAS
Tahun 2015 dan 2016 per Output Kegiatan

No	URAIAN KEGIATAN	2015			2016		
		PAGU DALAM DIPA (RP)	REALISASI (RP)	%	PAGU DALAM DIPA (RP)	REALISASI (RP)	%
1	Pemasyarakatan Standardisasi	4.085.000.000	4.033.360.967	98,74	1.938.033.000	1.935.331.438	99,86
2	Jejaring Pendidikan Standardisasi	3.281.000.000	3.117.686.194	95,02	658.888.000	657.915.495	99,85
3	Partisipasi Masyarakat	1.272.940.000	1.244.257.798	97,75	2.000.000.000	1.993.391.786	99.67

4	Layanan jasa Diklat Standardisasi	997.612.000	992.921.796	99,53	1.034.331.200	1.032.822.800	99,85
	TOTAL	**9.636.552.000**	**9.388.226.755**	**97,76**	**5.631.252.000**	**5.612.845.109**	**99,67**

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa pagu anggaran PUSDIKMAS pada tahun 2016 mengalami penurunan karena efisiensi yang dilakukan karena kebijakan Pemerintah Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari laporan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Kedeputian IPS - Badan Standardisasi Nasional TA. 2016 dapat disimpulkan bahwa secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja TA. 2016 telah dapat dipenuhi oleh Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi. Capaian kinerja PUSDIKMAS pada tahun 2016 :

1). Persentase peningkatan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebesar 11.751 dari target 5082 peserta; 2). Prosentase peningkatan jumlah materi pendidikan dan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan tercapai sebesar 4 dari 4 materi yang ditargetkan 3). Indeks Kepuasan Pelanggan pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tercapai 86,32 dari 82 yang ditargetkan 4). Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tercapai sebesar 25%, dari 10 % yang ditargetkan 5). Prosentase peningkatan jumlah materi promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan tercapai sebesar 10 % dari 10 % yang ditargetkan.

Dari seluruh hasil capaian kinerja sasaran tersebut di atas, tetap diperlukan upaya guna meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal sehingga dapat mencapai target yang direncanakan.

Kiranya LAKIP Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Kedeputian IPS, BSN Tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BSN, khususnya Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi di masa mendatang.